

INOVASI DESA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS DESA)

Syamsul Arifin

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

e-mail: samsulcangan@gmail.com

Abstract

This study examines the role of village innovation in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (Village SDGs) in Gentengkulon Village, Genteng District, Banyuwangi Regency. The main research problems focus on how village innovations are developed, the extent of community involvement, and the factors determining the sustainability of innovation in achieving the Village SDGs. This study is positioned as research that integrates public service, economic, social, and environmental innovations, community participation, and sustainability within a single analytical framework. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively from village government officials, program managers, village institutions, and community members. The data were analyzed through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings indicate that there are 14 programs or initiatives relevant to the Village SDGs, consisting of five in the economic sector, one in public services, four in the social sector, and four in the environmental sector. Community participation is categorized as high during the implementation and utilization stages, but moderate during the planning and evaluation stages. The sustainability of innovation is supported by village leadership, community participation, technology, and partnerships, while limitations in human resources, funding, and evaluation remain the main challenges. These findings emphasize the importance of integrated, participatory, and sustainable innovation in strengthening the achievement of the Village SDGs. The contribution of this study lies in strengthening the relationship between local innovation, governance, participation, and the village sustainable development agenda.

Keywords: Village Innovation, Sustainable Development, Village SDGs.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran inovasi desa dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa) di Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan utama penelitian adalah bagaimana inovasi desa dikembangkan, sejauh mana masyarakat terlibat, serta faktor yang menentukan keberlanjutan inovasi dalam pencapaian SDGs Desa. Penelitian ini menempati posisi sebagai kajian yang mengintegrasikan inovasi

pelayanan publik, ekonomi, sosial, lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan dalam satu kerangka analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari unsur pemerintah desa, pengelola program, lembaga desa, dan masyarakat. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 program atau inisiatif yang relevan dengan SDGs Desa, terdiri atas lima bidang ekonomi, satu pelayanan publik, empat sosial, dan empat lingkungan. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, namun sedang pada tahap perencanaan dan evaluasi. Keberlanjutan inovasi didukung kepemimpinan desa, partisipasi masyarakat, teknologi, dan kemitraan, sedangkan keterbatasan SDM, anggaran, serta evaluasi menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam memperkuat pencapaian SDGs Desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan hubungan antara inovasi lokal, tata kelola, partisipasi, dan agenda pembangunan berkelanjutan desa.

Kata Kunci: Inovasi Desa, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs Desa.

A. Pendahuluan

Pembangunan desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan karena desa merupakan ruang terdekat dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Berbagai persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, keterbatasan pelayanan publik, kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan, dapat ditemukan secara langsung pada tingkat desa. Oleh karena itu, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tidak cukup hanya dilaksanakan melalui kebijakan pada tingkat nasional dan daerah, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat desa. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut diwujudkan melalui SDGs Desa yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola ke dalam 18 tujuan pembangunan desa (Mustafa & Afrianto, 2022). Sistem Informasi Desa juga menempatkan data desa sebagai dasar dalam penyusunan pembangunan yang lebih sistematis, terukur, terarah, dan berkelanjutan (Iskandar & Iskandar, 2023).

Pelaksanaan SDGs Desa menuntut pemerintah desa untuk tidak hanya menjalankan program pembangunan secara rutin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai inovasi yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan lokal. Inovasi desa dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi, pengelolaan lingkungan, maupun bentuk kolaborasi antarpemangku kepentingan. Inovasi menjadi penting karena setiap desa memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, sumber daya, serta kapasitas kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, satu pola pembangunan belum tentu dapat diterapkan secara seragam pada seluruh desa. Pemerintah desa memerlukan kemampuan adaptif untuk menciptakan program yang relevan dengan kondisi lokal sekaligus memiliki keterkaitan yang nyata dengan indikator pembangunan berkelanjutan.

Urgensi inovasi desa semakin terlihat ketika pembangunan berkelanjutan tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara seimbang. Argarani, Yusuf, dan Malik (2025), misalnya, menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di pedesaan memerlukan penguatan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa inovasi pembangunan desa perlu dirancang secara lebih komprehensif sehingga manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, partisipasi sosial, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya inovasi dalam proses pembangunan desa. Rasaili et al. (2024) mengkaji inovasi desa melalui integrasi agile governance dan pembangunan berkelanjutan di Desa Lobuk, Kabupaten Sumenep, dan Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif dan responsif dapat mendorong digitalisasi pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, perbaikan pendidikan, pemenuhan infrastruktur, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kemampuan pemerintah desa untuk beradaptasi dan melakukan pembaruan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian mengenai inovasi kolaboratif menunjukkan bahwa pembangunan desa berkelanjutan juga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor sehingga pemerintah tidak menjadi satu-satunya pelaksana pembangunan. Pendekatan kolaborasi membuka ruang bagi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan unsur lainnya untuk berkontribusi dalam penyelesaian persoalan desa.

Perkembangan penelitian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa inovasi desa semakin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital. Kusja dan Sutikno (2026) menjelaskan bahwa konsep Smart Village dapat menjadi model inovasi tata kelola yang mengintegrasikan digitalisasi pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur desa, dan partisipasi aktif masyarakat (Saadah et al., 2026).

Digitalisasi dalam konteks tersebut tidak hanya diposisikan sebagai penggunaan teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, Gunawan dan Khosihan (2026) menekankan pentingnya masyarakat dalam pencapaian SDGs Desa. Penelitiannya menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok pemuda dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan karena masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana dan aktor perubahan.

Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami inovasi, partisipasi, digitalisasi, pemberdayaan, dan kolaborasi dalam pembangunan desa. Namun demikian, penelitian terdahulu cenderung menempatkan aspek-aspek tersebut dalam fokus yang relatif spesifik. Rasaili et al. (2024), misalnya, lebih menekankan inovasi dari perspektif *agile governance*; Kusja dan Sutikno (2026) berfokus pada transformasi pelayanan publik melalui konsep Smart Village; sedangkan Gunawan dan Khosihan (2026) lebih menitikberatkan pada peran dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan SDGs Desa. Di sisi lain, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan masih adanya kecenderungan penelitian yang belum mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk melihat inovasi desa secara lebih integratif sebagai instrumen yang menghubungkan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, teknologi, dan keberlanjutan dengan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian mengenai “Inovasi Desa dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa)” menjadi penting dilakukan karena keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya maupun jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan pembaruan yang relevan, adaptif, partisipatif, serta berkelanjutan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk-bentuk inovasi yang dikembangkan di tingkat desa, proses pelaksanaannya, keterlibatan aktor-aktor pembangunan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat keberlanjutan inovasi tersebut sehingga inovasi tidak berhenti pada program jangka pendek, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem pembangunan desa.

Posisi penelitian ini berada pada upaya menghubungkan kajian inovasi desa dengan kerangka pencapaian SDGs Desa secara lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak memusatkan perhatian pada satu bentuk inovasi, seperti digitalisasi, *agile governance*, pemberdayaan, atau kolaborasi,

penelitian ini memandang inovasi desa sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan aspek tata kelola, sosial, ekonomi, teknologi, partisipasi, dan keberlanjutan. Kontribusi akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pembangunan desa dengan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara inovasi lokal dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa serta pemangku kepentingan dalam mengembangkan inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat, potensi lokal, dan indikator SDGs Desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model atau indikator untuk mengukur efektivitas dan keberlanjutan inovasi desa dalam mendukung pencapaian SDGs di Desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Ansari & Arifin, 2026)., yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk inovasi desa serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Penelitian dilaksanakan di Desa Gentengkulonon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Target atau sasaran penelitian adalah pelaksanaan berbagai program inovasi desa yang berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa, sedangkan subjek penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pengelola program atau lembaga desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi desa. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan kemampuannya dalam memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, pengelompokan dan pengolahan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Ansari dkk., 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi terhadap pelaksanaan program inovasi desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah desa, profil desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), data SDGs Desa, laporan kegiatan, serta dokumen lain yang relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiono, 2019). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh

dari berbagai informan dan metode pengumpulan data (Miles & Huberman, 2014). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan memfokuskan analisis pada bentuk inovasi desa, proses pelaksanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusi inovasi tersebut terhadap pencapaian indikator SDGs Desa.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Inovasi Desa dan Kontribusinya terhadap Pencapaian SDGs Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembangunan yang dilaksanakan di Desa Desa Gentengkulon diarahkan pada upaya menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Berdasarkan hasil telaah dokumen, ditemukan beberapa bentuk inovasi utama, yaitu inovasi pelayanan publik/digitalisasi pelayanan, inovasi pemberdayaan ekonomi/BUMDes/UMKM, inovasi sosial atau kesehatan, serta inovasi lingkungan atau pengelolaan sumber daya. Keberadaan inovasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa mulai bergerak dari pola kegiatan yang bersifat rutin menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Inovasi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan SDGs Desa, terutama pada aspek kemiskinan, sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi merata, lingkungan berkelanjutan, serta kemitraan pembangunan desa. Secara resmi, SDGs Desa merupakan upaya terpadu yang mencakup pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola melalui 18 tujuan pembangunan di tingkat desa (Rusdiyanto, 2023).

Temuan tersebut didukung oleh hasil inventarisasi program pembangunan Desa Gentengkulon, teridentifikasi sebanyak 14 program/inisiatif yang relevan dengan SDGs Desa, terdiri atas 5 program bidang ekonomi (35,7%), 1 program inovasi pelayanan publik (7,1%), 4 program bidang sosial (28,6%), dan 4 program bidang lingkungan (28,6%). Berikut tabel 1. Hasil temuan peneliti;

No.	Bidang	Jumlah Program / Inisiatif	Persentase	Program
1	Ekonomi	5	35,7%	Ketahanan pangan melalui BUMDes, pemanfaatan lahan produktif, usaha sembako dan ternak, pelatihan <i>affiliate marketing</i> , Koperasi Desa Merah Putih

2	Pelayanan publik	1	7,1%	Simas Mandiri/Smart Kampung berbasis teknologi informasi
3	Sosial	4	28,6%	BLT Dana Desa, BPNT, pendataan DTKS/ KPM, pelayanan kesehatan/imunisasi
4	Lingkungan	4	28,6%	Drainase, SANIMAS SPALD-S, plengsengan / pengendalian erosi, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana
	Total	14	100%	

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada satu bidang pembangunan, tetapi memiliki keterkaitan dengan beberapa dimensi SDGs Desa. Pola tersebut penting karena permasalahan pembangunan desa pada dasarnya bersifat saling berhubungan. Sebagai contoh, [inovasi ekonomi] tidak hanya berpotensi meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan penguatan kemandirian desa. Demikian pula, inovasi pelayanan/digital dapat memberikan manfaat berupa kemudahan akses pelayanan sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola. Dengan demikian, makna utama temuan ini bukan terletak pada jumlah program inovasi semata, melainkan pada kemampuan inovasi tersebut untuk memberikan manfaat lintas bidang pembangunan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keterpaduan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Suparmoko, 2020) serta melalui konsep tata kelola adaptif yang menempatkan kemampuan pemerintah dalam merespons perubahan sebagai bagian penting dari pembangunan. Pada tingkat desa, penggunaan data dan informasi kondisi objektif desa juga diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, terukur, terarah, dan berkelanjutan serta mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa. Dalam konteks penelitian ini, inovasi di Desa Desa Gentengkulon dapat dipahami sebagai mekanisme adaptasi pemerintah desa dan masyarakat dalam menerjemahkan tujuan pembangunan yang luas menjadi program yang sesuai dengan permasalahan dan sumber daya lokal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rasaili et al. (2024) yang menemukan bahwa inovasi pembangunan desa dapat berkembang melalui tata kelola yang lincah, adaptif, dan berkelanjutan (Rasaili et al., 2024). Studi tersebut menunjukkan bahwa inovasi di tingkat desa dapat muncul dalam bentuk digitalisasi pelayanan, peningkatan partisipasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, pemenuhan infrastruktur, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya melihat inovasi dari perspektif agile governance, tetapi secara khusus mengidentifikasi keterkaitan setiap inovasi yang ditemukan dengan sasaran SDGs Desa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan dari sekadar keberadaan inovasi menuju analisis mengenai bagaimana inovasi lokal dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan pada tingkat desa.

Munculnya berbagai inovasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kepemimpinan kepala desa, kemampuan aparatur, ketersediaan data, dukungan masyarakat, potensi sumber daya lokal, dan dukungan anggaran/kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara, jelaskan faktor yang paling dominan berdasarkan data lapangan menjadi faktor yang paling menentukan dalam proses pembentukan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi desa tidak semata-mata muncul karena tersedianya teknologi atau anggaran, melainkan juga karena kemampuan aktor lokal dalam mengenali persoalan, memanfaatkan sumber daya, serta membangun mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan kondisi desa. Perspektif grassroots innovation juga menekankan bahwa inovasi berbasis masyarakat sering berkembang melalui perubahan bertahap yang berkaitan dengan nilai dan konteks lokal sehingga kebijakan pendukungnya perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat (Ng et al., 2018).

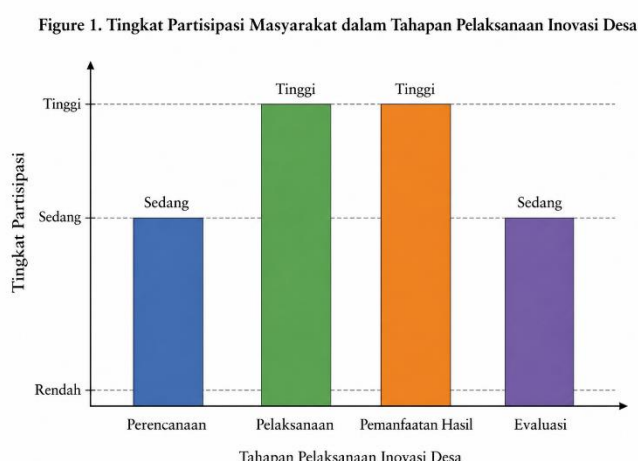
Implikasi temuan pertama adalah bahwa pemerintah desa perlu menempatkan inovasi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan, bukan sebagai kegiatan tambahan yang berdiri sendiri. Setiap inovasi sebaiknya memiliki keterkaitan yang jelas dengan masalah desa, indikator pembangunan, kelompok penerima manfaat, serta tujuan SDGs Desa yang hendak dicapai. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah desa melakukan evaluasi bukan hanya berdasarkan terlaksananya kegiatan, tetapi berdasarkan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam praktik kebijakan, data SDGs Desa dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk mengidentifikasi masalah prioritas, sedangkan inovasi lokal menjadi instrumen untuk merespons masalah tersebut sesuai kapasitas dan potensi desa.

2. Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Inovasi Desa

Temuan kedua menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi desa berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan masyarakat dan kemampuan pemerintah desa membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat di Desa Desa Gentengkulon terlibat melalui musyawarah desa dalam perencanaan program, meskipun intensitas keterlibatan tersebut bervariasi pada setiap tahapan. Selain masyarakat, inovasi juga melibatkan BUMDes, kelompok perempuan, karang taruna, kelompok tani, pelaku UMKM,

lembaga pendidikan, pihak swasta, pemerintah daerah atau pihak lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi desa tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah desa, tetapi juga pada kemampuan mengorganisasikan sumber daya dan aktor yang tersedia.

Bukti empiris mengenai partisipasi tersebut terlihat dari jumlah peserta musyawarah dari unsur kelompok pemuda, enerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat paling aktif pada tahap Musrembangdes, sedangkan keterlibatan pada tahap pelaksanaan masih relatif terbatas. Salah seorang informan menyampaikan, “Kami biasanya mendapat informasi dari perangkat desa dan ikut hadir ketika ada musyawarah atau kegiatan. Kalau ada program yang berkaitan dengan kebutuhan warga, kami juga ikut memberikan usulan dan membantu pelaksanaannya. Menurut saya, program seperti pelayanan yang lebih cepat dan kegiatan pemberdayaan ekonomi cukup membantu masyarakat.” Berdasarkan observasi, bentuk partisipasi masyarakat juga tidak selalu berupa kontribusi material, tetapi dapat berupa penyampaian gagasan, tenaga, informasi, pengelolaan kegiatan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil inovasi. Gambaran tingkat keterlibatan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Pola pada Figure 1 perlu dibaca berdasarkan perbedaan keterlibatan masyarakat pada setiap tahap inovasi. Apabila data menunjukkan bahwa partisipasi paling tinggi terdapat pada tahap pelaksanaan tetapi lebih rendah pada tahap perencanaan dan evaluasi, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih lebih banyak berperan sebagai pelaksana atau penerima manfaat daripada sebagai pengambil keputusan. Sebaliknya, apabila keterlibatan masyarakat relatif merata sejak identifikasi masalah hingga evaluasi, hal tersebut menunjukkan berkembangnya pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif. Karena itu,

tingginya jumlah peserta dalam suatu kegiatan belum secara otomatis menggambarkan kualitas partisipasi; aspek yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, memengaruhi keputusan, dan ikut mengendalikan keberlanjutan program.

Secara konseptual, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *participatory governance* dan modal sosial. Partisipasi memungkinkan pengetahuan dan pengalaman lokal masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan hubungan kepercayaan dan kerja sama antarpelaku dapat memperkuat kapasitas kolektif desa. Penelitian mengenai kinerja pelayanan desa di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, persepsi masyarakat, dan kinerja pemerintahan desa (Handayani et al., 2023). Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, keterlibatan masyarakat bukan hanya instrumen untuk memperoleh dukungan terhadap program, tetapi menjadi bagian dari mekanisme yang menentukan kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan Maharani dan Abubakar (2024), yang menempatkan inovasi kolaboratif sebagai unsur penting dalam pembangunan desa berkelanjutan dan menekankan perlunya proses kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya. Pada konteks internasional, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola berkelanjutan di wilayah perdesaan menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan yang terlalu terpusat, ketimpangan relasi kekuasaan, lemahnya insentif, dan rendahnya kepercayaan dapat menghambat keterlibatan masyarakat secara bermakna (Guo, 2020), (Shadreck, 2018). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan persoalan lintas konteks, tetapi bentuk dan intensitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan serta hubungan sosial pada masing-masing wilayah.

Tingkat partisipasi yang ditemukan di Desa Desa Gentengkulon kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah desa, kepercayaan masyarakat, manfaat langsung program, kepemimpinan lokal, kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data lapangan faktor komunikasi aktif pemerintah desa serta manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tampak menjadi pendorong utama, sedangkan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada tahap perencanaan dan evaluasi menjadi hambatan yang paling sering muncul. Apabila masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari inovasi dan diberikan ruang untuk berperan sejak tahap awal, kecenderungan keterlibatan dapat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, komunikasi yang terbatas atau dominasi pengambilan keputusan oleh aktor tertentu dapat

menyebabkan masyarakat memandang inovasi sebagai program pemerintah semata dan bukan sebagai kegiatan bersama.

Implikasi temuan kedua adalah pentingnya mengubah orientasi partisipasi dari sekadar kehadiran masyarakat menjadi keterlibatan substantif dalam siklus inovasi. Pemerintah desa perlu menyediakan ruang partisipasi sejak identifikasi masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi program. Kolaborasi juga perlu diperluas dengan melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terwakili serta lembaga eksternal yang memiliki sumber daya dan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan pola tersebut, inovasi tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat sehingga peluang keberlanjutan program menjadi lebih besar.

3. Keberlanjutan Inovasi serta Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian SDGs Desa

Temuan ketiga merupakan sintesis dari keseluruhan hasil penelitian dan menunjukkan bahwa kontribusi inovasi terhadap pencapaian SDGs Desa sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keberlanjutan inovasi. Hasil penelitian di Desa Desa Gentengkulon memperlihatkan bahwa inovasi yang telah dilaksanakan memberikan manfaat perubahan utama berdasarkan hasil penelitian, tetapi keberlanjutannya masih dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, partisipasi masyarakat, dukungan teknologi, dan kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, keberhasilan inovasi tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan menciptakan program baru, tetapi perlu dilihat dari kemampuannya untuk terus berfungsi, berkembang, dan memberikan manfaat setelah tahap awal pelaksanaan.

Bukti empiris mengenai keberlanjutan inovasi diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 inovasi/program masih berjalan secara aktif, 5 inovasi sedang dalam tahap pengembangan, sedangkan belum ditemukan program yang secara pasti mengalami penghentian. Faktor pendukung yang paling menonjol adalah dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, sementara hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum meratanya keterlibatan masyarakat. Lima program yang dikategorikan sedang dikembangkan terutama berkaitan dengan rencana ketahanan pangan, penguatan BUMDes, pemanfaatan lahan produktif, pengembangan usaha desa, dan pelatihan pemasaran digital yang masuk dalam agenda perencanaan Desa Gentengkulon 2026. Berikut ringkasan hubungan antara aspek, temuan, dan interpretasinya disajikan pada Tabel 2:

Table 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlanjutan Inovasi Desa

Aspek	Temuan	Interpretasi
Kelembagaan dan kepemimpinan	Pemerintah Desa Gentengkulon berperan aktif dalam menginisiasi, mengoordinasikan, dan mengarahkan pelaksanaan berbagai program inovasi desa.	Kepemimpinan yang responsif menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi desa.
Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi berada pada kategori sedang.	Masyarakat telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program, namun keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi masih perlu diperkuat.
SDM dan kapasitas aparatur	Aparatur desa mampu melaksanakan program inovasi, tetapi kapasitas dalam pengelolaan teknologi, data, dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan.	Peningkatan kompetensi aparatur diperlukan agar inovasi dapat dikelola secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Anggaran dan sarana	Dukungan anggaran dan sarana tersedia, tetapi belum seluruh program inovasi memperoleh dukungannya secara optimal.	Ketersediaan sumber daya mendukung pelaksanaan inovasi, sedangkan keterbatasannya dapat menghambat pengembangan program.
Teknologi/data	Teknologi telah dimanfaatkan dalam pelayanan publik dan penyampaian informasi desa, tetapi penggunaan data untuk monitoring dan evaluasi belum optimal.	Digitalisasi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun pemanfaatan data perlu diperkuat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
Kemitraan	Pemerintah desa telah melibatkan BUMDes, kelompok masyarakat, lembaga lokal, dan pihak eksternal dalam sejumlah kegiatan inovasi.	Kemitraan memperluas dukungan sumber daya dan memperkuat peluang keberlanjutan inovasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa.

Temuan ketiga memiliki hubungan langsung dengan dua temuan sebelumnya. Bentuk inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana dibahas pada subbab pertama akan lebih berpeluang menghasilkan manfaat ketika

didukung oleh partisipasi dan kolaborasi sebagaimana dibahas pada subbab kedua. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dipertahankan apabila terdapat kapasitas kelembagaan, sumber daya, mekanisme evaluasi, dan komitmen aktor lokal. Dengan demikian, ketiga temuan membentuk suatu pola yang saling berkaitan: relevansi inovasi menentukan kesesuaian program, partisipasi menentukan penerimaan dan kepemilikan sosial, sedangkan kapasitas kelembagaan menentukan keberlanjutan inovasi. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs Desa melalui inovasi merupakan suatu proses, bukan sekadar hasil dari pelaksanaan satu program tertentu.

Dari perspektif teoretis, pola tersebut memperkuat pandangan bahwa inovasi pembangunan desa membutuhkan kombinasi antara kapasitas adaptif pemerintah, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Konsep agile governance menekankan kemampuan pemerintahan untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan publik (Rivelino, 2022), sementara perspektif grassroots innovation menekankan pentingnya konteks, nilai, dan kapasitas masyarakat lokal dalam menghasilkan pembaruan (Smith & Seyfang, 2013). Selain itu, penelitian mengenai pembangunan perdesaan di Indonesia menemukan bahwa penggunaan sistem informasi dan mekanisme pengendalian berkaitan dengan akuntabilitas kinerja serta pembangunan perdesaan berkelanjutan, yang memperlihatkan pentingnya dukungan tata kelola dan informasi bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, keberlanjutan inovasi desa perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kemampuan institusi, aktor, teknologi, dan kondisi sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan sekaligus memperluas penelitian Rasaili et al. (2024) mengenai pentingnya pemerintahan desa yang adaptif dalam menghasilkan inovasi pembangunan, serta memperkuat penelitian Maharani dan Abubakar (2024) mengenai pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa berkelanjutan. Hasil ini juga memiliki keterkaitan dengan studi mengenai pembangunan desa yang menunjukkan bahwa kebutuhan kebijakan dapat berbeda berdasarkan karakteristik desa, lokasi, kapasitas aktor, dan hambatan pembangunan yang dihadapi (Wahyudianto & Wahyudianto, 2020). Apabila terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan studi sebelumnya, perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik sosial ekonomi, kapasitas pemerintahan desa, kondisi sumber daya, bentuk inovasi, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tidak sama pada setiap lokasi penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan inovasi desa bukan hanya sebagai pembaruan administrasi atau penggunaan teknologi, tetapi sebagai mekanisme multidimensional yang menghubungkan potensi lokal, tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan keberlanjutan dengan

pencapaian SDGs Desa. Jika penelitian sebelumnya banyak menelaah inovasi melalui aspek tertentu seperti agile governance, pelayanan, kolaborasi, atau teknologi, penelitian ini memperlihatkan hubungan antarelemen tersebut dalam satu rangkaian proses pembangunan desa. Temuan penelitian menghasilkan pemahaman bahwa inovasi yang mendukung SDGs Desa memerlukan sedikitnya tiga kondisi utama, yaitu inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, partisipasi dan kolaborasi yang substantif, serta kapasitas kelembagaan yang menjamin keberlanjutan. Kerangka hubungan tersebut menjadi kontribusi ilmiah penelitian bagi pengembangan kajian inovasi dan pembangunan desa berkelanjutan.

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pemerintah desa perlu mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan berbasis data, memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat, memperluas kolaborasi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang menghubungkan capaian inovasi dengan tujuan SDGs Desa. Sistem Informasi Desa sendiri menempatkan data objektif desa sebagai dasar untuk mengarahkan pembangunan secara sistematis dan mempercepat pencapaian 18 tujuan SDGs Desa (Lisa et al., 2025). Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada cakupan satu desa/jumlah informan/periode pengamatan/keterbatasan data, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa dengan karakteristik berbeda. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antardesa, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta mengembangkan indikator untuk mengukur pengaruh inovasi terhadap perubahan skor atau capaian setiap tujuan SDGs Desa secara lebih terukur.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa inovasi desa di Desa Gentengkulon berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs Desa melalui pengembangan program pada bidang ekonomi, pelayanan publik, sosial, dan lingkungan. Pelaksanaan inovasi didukung oleh peran aktif pemerintah desa, pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Partisipasi masyarakat cenderung tinggi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, sedangkan pada tahap perencanaan dan evaluasi masih berada pada tingkat sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi desa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembaruan program pembangunan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan desa.

Keberlanjutan inovasi di Desa Gentengkulon dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, sumber daya manusia, dukungan anggaran,

pemanfaatan data, serta kemitraan. Dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama, sementara keterbatasan kapasitas SDM, anggaran, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat partisipasi masyarakat secara lebih menyeluruh, meningkatkan kapasitas aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data, serta memperluas kemitraan agar inovasi yang dikembangkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.

Daftar Rujukan

- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2 (1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Guo, R. (2020). Research on the Transformation of Rural Governance Models under the Background of Rural Revitalization. *Open Journal of Business and Management*, 8(3), 1274–1280. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2020.83082>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089–100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Iskandar, A. H., & Iskandar, A. H. (2023). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGS DESA. *Journal of Community Positive Practices*, 23(1), 96–115. <https://doi.org/10.35782/jcpp.2023.1.08>
- Lisa, L., Permadi, A. S., & Arnisyah, S. (2025). Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) melalui Data SDGs Di Desa Tampelas Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. *Bitnet Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 10(2), 37–47. <https://doi.org/10.33084/bitnet.v10i2.9650>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
- Mustafa, M., & Afrianto, D. (2022). PROBLEMATIKA PENDAMPINGAN PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 DI PROVINSI RIAU. *Masyarakat Madani Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 38–38. <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i1.17037>

- Ng, B., Mohamad, Z., & Chandran, V. (2018). Public policy for grassroots innovations initiatives: lessons learned from Malaysia. <http://eprints.um.edu.my/19392/>
- Rasaili, W., Suharyanto, D. F., Andiriyanto, Ach., Fitriyah, N. S., Zarnuji, Z., & Puspiningrum, I. I. (2024). Inovasi Desa Mandiri: Integrasi Agile Governance dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Tata Kelola Pedesaan. *Matra Pembaruan*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.45-60>
- Rivelino, R. (2022). Development of Agile Governance-Based Civil Service Police Unit Organization in DKI Jakarta Province. *Journal of Digitainability Realism & Mastery (DREAM)*, 1(2), 27–41. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i02.18>
- Rusdiyanto, R. (2023). STRATEGI PENGUATAN UMKM DESA SEMAMPIR MENJADI DESA MANDIRI_MINGGU 23 JULY 2023. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170434>
- Saadah, M. A., Yanti, O., Setiawan, W. J., Syeftiani, T., Permana, K., Hendriyaldi, H., & Haris, M. (2026). Building Smart Village Governance Beyond Technology: Evidence From a Participatory Action Research on OpenSID Implementation in Indonesia. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.33394/jpu.v7i1.18877>
- Shadreck, T. (2018). Rural development: Lessons never learnt. *International Journal of Peace and Development Studies*, 9(4), 36–52. <https://doi.org/10.5897/ijpds2018.0319>
- Smith, A., & Seyfang, G. (2013). Constructing grassroots innovations for sustainability. *Global Environmental Change*, 23(5), 827–829. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.07.003>
- Suparmoko, M. (2020). KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL. 9(1), 39–50. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>
- Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Alfabeta.
- Wahyudianto, H., & Wahyudianto, H. (2020). Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya. *Matra Pembaruan*, 4(1), 47–57. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.47-57>